

Pandemi Covid-19 Kian Merajalela

PURWOREJO (KR) - Kasus pandemi Covid-19 di Kabupaten Purworejo kian merajalela. Jumlah terkonfirmasi positif juga semakin banyak. Bahkan data terkini kasus terpapar positif covid-19 bertambah 31 orang. "Kemarin pagi muncul 4 orang terkonfirmasi positif, sore harinya bertambah 6 orang dan sekarang bertambah lagi 21 orang," kata Juru Bicara Protokol Covid-19 Kabupaten Purworejo dr Tolkha Amaruddin Sp THT KL, Rabu (29/7). Munculnya pasien positif Covid-19, hingga kini di Purworejo total kasus terkonfirmasi positif-19 sejak pertama kali ditemukan, sudah mencapai 152 orang. "Ada pula kasus positif yang meninggal dunia di RSUD Tjitrowardojo, seorang laki-laki berusia 54 tahun, warga Desa Sambeng Kecamatan Bayan. Pasien menderita komorbid kencing manis dan darah tinggi," ungkapnya seraya menambahkan, hingga kini sudah ada dua orang positif Covid-19 di Purworejo meninggal dunia.

Dijelaskan penambahan kasus ini berasal dari sejumlah klaster yang sudah ada. Terbanyak 14 orang dari klaster Pasar Suronegaran, 5 orang dari klaster hajatan dan 4 orang dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purworejo. Di antara mereka 4 orang yang hasil swabnya keluar pagi hari merupakan warga Kecamatan Purworejo, Ngombol, Banyuurip, dan Gebang. Untuk 6 orang hasil swab sore berasal dari Kecamatan Banyuurip 3 orang, serta dari Kecamatan Bener, Grabag dan Purworejo masing-masing 1 orang. Sedang untuk 21 orang hasil swab terkini berasal dari Kecamatan Purworejo 7 orang, Bener 6 orang, Loano dan Bayan masing-masing 2 orang, serta Kecamatan Banyuurip, Grabag, Bagelen, dan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang masing-masing 1 orang. **(Nar)-o**

Tiga Proyek di Salatiga Jadi Temuan BPK

SALATIGA (KR) - Tiga proyek besar di Kota Salatiga tahun 2019 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diwajibkan mengembalikan keuangan negara kurang lebih Rp 477 juta. Namun sampai batas waktu tanggal 6 Juli 2020 lalu masih terjadi kekurangan bayar Rp 150 juta lebih.

Pernyataan itu ditegaskan anggota Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DPRD Salatiga, Agus Pramono kepada *KR*, Senin (27/7). Menurutnya, akumulasi pengembalian tersebut untuk tiga proyek yakni proyek Lapangan Pancasila anggaran Rp 16,7 miliar, kemudian proyek Taman Sidomukti dan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup (LH) Salatiga.

"Dari tiga proyek besar 2019 Salatiga tersebut semuanya menjadi temuan pemeriksaan BPK dan harus mengembalikan uang ke kas negara kurang lebih Rp 477 juta. Saat ini dari hasil kerja kami menemukan pengembalian belum lunas. Diperkirakan masih terjadi kekurangan sekitar Rp 150 juta," tandas Agus Pramono ditemui di kantor DPRD Salatiga.

Agus mengungkapkan pihaknya berharap semuanya biasa diselesaikan secara baik-baik, jangan sampai terjadi persoalan di belakang hari. Temuan BPK berapapun besaran harus dikembalikan. Diharapkan rekanan harus mengembalikan dan harus patuh terhadap temuan BPK ini. Jangan sampai Aparat Penegak Hukum (APH) masuk karena semua ada konsekuensinya.

Ketua Komisi C DPRD Salatiga, M Kemat membenarkan masalah ini dan Komisi C telah memanggil Kepala Dinas LH dan Inspektorat Kota Salatiga. "Kami telah menggelar rapat untuk menyelesaikan masalah temuan BPK di tiga proyek dan terjadi kekurangan bayar. Sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh BPK yakni pada 6 Juli 2020 lalu belum diselesaikan.

Ini jelas telah terjadi pelanggaran dan menjadi tanggung jawab dinas teknis LH dan rekanan. Sampai Senin (27/7) kami juga belum mendapat laporan dari dinas," ujar M Kemat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Prasetyo Ichtarto, mengatakan pihaknya telah menghubungi rekanan pelaksana ketiga kegiatan ini. **(Sus)-o**

Desa Cokro Bangun Taman Wisata

KLATEN (KR) - Pemerintah Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten membangun taman wisata dengan konsep perpaduan Jawa - Belanda. Pembangunan taman wisata diharapkan mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes). Kepala Desa Cokro, Heru Budi Santosa, mengatakan, pembangunan kawasan wisata desa mulai dikerjakan awal tahun 2020. Tahap awal, pembangunan dilahan seluas 1.700 meter persegi dianggarkan Rp 500 juta dari Dana Desa. "Taman wisata desa dibuat dengan konsep kolaborasi Jawa - Belanda. Kenapa demikian karena daerah sini banyak jejak sejarah, salah satunya bangunan bekas rel lori peninggalan zaman Belanda," ujarnya, Selasa (28/7).

Dijelaskan, taman wisata desa nantinya dilengkapi beragam wahana seperti kolam kecehan, rumah pohon, arena kuliner, outbound, outing class, joglo dan lainnya. Keberadaannya sekaligus sebagai pendukung objek wisata yang sudah ada seperti Umbul Cokro.

"Kami menyediakan wahana yang belum ada di Umbul Cokro. Target pembangunan wisata desa selesai tiga tahun. Selanjutnya jika sudah selesai pengelolaannya diserahkan ke BUMDes. Nanti segera dibentuk BUMDes," ujarnya. Budi berharap dengan adanya wisata desa nanti akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan membantu mendongkrak PADes. Mengingat selama ini PADes Desa Cokro sangat minim yakni hampir Rp 7 juta/tahun. "Taman wisata desa ini terletak disisi utara Umbul Cokro dan berdekatan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pusur. Keberadaan taman wisata ini nanti sekaligus dalam rangka menjaga kelestarian alam dan sungai," imbuhnya. **(Lia)-o**



KR-Indratno Epilianto

Taman wisata Desa Cokro masih dalam proses pembangunan.

Polisi Harus Tingkatkan Layanan Masyarakat

PEMALANG (KR) - Polres Pemalang berusaha mewujudkan wilayah bebas korupsi(WBK) dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah itu ditandai dengan penyematan Pin WBK oleh Kapolres Pemalang AKBP Ronny Tri Prasetyo Nugroho pada personil Polri dan PNS Polres Pemalang, Senin (27/7) di halaman Mapolres Pemalang.

"Ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk menghentikan pungli, jauli korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik," tutur AKBP Ronny Tri Prasetyo Nugroho. Diharapkan dengan disematkannya Pin WBK pelayanan publik Polres Pemalang semakin profesional, modern dan terpercaya.

Sementara itu setiap hari pascaapel pagi, seluruh personil Polres Pe-

malang meneriakkan yel-yel zona integritas menuju WBK dan melaksanakan senam revolusi mental untuk menanamkan semangat menuju Polres Pemalang yang bebas dari korupsi. Menurut Kapolres beberapa inovasi pelayanan publik telah berjalan. Kepada jajarannya untuk mempertahankan, bahkan untuk ditingkatkan demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Selain menciptakan inovasi pelayanan publik, juga sesuai kualitas kinerja personil Polres Pemalang akan diberi reward dan punishment. Pemberian penghargaan bagi personil maupun PNS yang berprestasi dan mempunyai dedikasi tinggi telah dilakukan. Tujuannya agar menjadi pendorong bagi personil yang lain agar termotivasi menjadi personil poli yang bersih, jujur dan berprestasi.

(Cry)-o



KR-Karyono

Kapolres Pemalang menyematkan pin anti korupsi.

TERKAIT KASUS TAMBANG MERAPI

Polres Klaten Panggil Sejumlah Saksi

KLATEN (KR) - Polres Klaten bakal memanggil para saksi untuk dilakukan klarifikasi terkait kasus tambang PT STAR yang pernah beroperasi di Tegalmulyo, Kemalang, Klaten. Konflik internal pengusaha tambang ini dipicu dari bagi hasil usaha pertambangan yang tak sesuai dengan kesepakatan.

"Nanti kita klarifikasi terkait dengan beberapa pihak. Termasuk akan kita datangkan ahli baik dari pidana maupun perdata. Selanjutnya perkembangan nanti saya sampaikan," ujar Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Andrian-syah Rithas Hasibuan, Selasa (28/7).

Aduan tersebut dilaporkan oleh Wisnu Nugroho warga Semanggi, Pasar Kliwon, Solo ke Polres Klaten pada tahun 2019. Terakhir, polisi telah mengambil keterangan para ahli.

Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2-HP) pertama telah diberikan kepada pelapor pada April 2020.

"Kami sudah memproses aduan itu dan melakukan penyelidikan. Ini kan persoalan internal perusahaan, terkait ada beberapa perjanjian," ujar Hasibuan.

Sementara itu, Wisnu Nugroho bersama kuasa hukumnya, Jamal, mendatangi Polres Klaten, Senin (27/7) sore. Kedatangannya itu untuk menindaklanjuti aduan yang pernah dikirim ke Polres

Klaten pada tahun 2019.

"Silaturahmi ke Polres Klaten ini untuk menanyakan aduan klien kami pak Wisnu. Beliau ini sudah hampir satu tahun buat laporan ke Polres Klaten, aduan, tidak mampu dinaik-naikkan, saya gak tahu kenapa," ujar Jamal.

Jamal mengatakan, perihal SP2HP yang diterima tertanggal 6 April 2020 terkait kebutuhan ahli perdata, pihaknya juga ingin memastikan apakah polisi telah meminta keterangan ahli perdata.

Kalau memang belum mendapatkan dua alat bukti sesuai marwah KUHP, ayo saya bantu nyari dua alat bukti tersebut. Kami menghargai institusi Polri, teman-teman penyidik yang sudah dibiayai oleh negara maka harapan saya tunjukkanlah profesional-

itas.

Sebagai informasi, kasus ini bermula ketika empat sahabat masing-masing Wisnu Nugroho warga Solo, AFR warga Sleman, AZS warga Klaten, dan HKY warga Solo bersepakat membangun usaha di bidang pertambangan. Melalui PT.

STAR izin usaha pun keluar dengan daerah operasi di Tegalmulyo, Kemalang, Klaten. Usaha tambang yang dikelola sejak awal tahun 2019 itu tak berlangsung lama.

Usaha tambang tutup diakhir tahun 2019 karena konflik internal. Wisnu merasa dikhianati oleh HKY. Ia tak bisa menikmati hasil dari usaha tersebut. Merasa dirugikan, Wisnu kemudian melaporkan HKY ke Polres Klaten.

(Lia)-o

KASUS COVID-19 MASIH ADA

Kegiatan 1 Muharram Ditunda

MAGELANG (KR) - Saat menyerahkan dana Baznas dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19, Bupati Magelang, Zaenal Arifin memberikan arahan agar kegiatan 1 Muharram yang mengundang dan melibatkan banyak orang untuk ditunda, mengingat kasus Covid-19 masih ada di wilayah Kabupaten Magelang.

"Satu Muharram biasanya kita bikin acara pengajian akbar di lapangan dengan mengundang ribuan orang. Tahun ini kita diminta agar tidak membuat kegiatan secara masif mengingat pandemi ini masih ada, maka kegiatan 1 Muharram ditunda dahulu. Masalah pentasarufannya *monggo* diatur. Kalau kita nanti kumpul besar-besaran bisa jadi viral," tutur Bupati Magelang, Zaenal Arifin saat acara pentasarufan kepada mustahik dari Baznas Kabupaten Magelang dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 oleh Bupati Magelang di Rumah Dinas Bupati Magelang, Selasa (28/7).

Hingga saat ini jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 masih terdapat 7 orang, bahkan sebelumnya sempat mencapai titik tertinggi sebanyak 143 terkonfirmasi positif Covid-19.

Meskipun adanya larangan untuk berkumpul atau melakukan aktivitas secara masif, lanjut Zaenal, jangan sampai hal tersebut nantinya membatasi kreativitas masyarakat, terlebih lagi kreativitas pada anak-anak yang masih sekolah.

"Terutama pada anak-anak yang masih sekolah ini. Saya yakin mereka sudah sangat kangen ke sekolah dan ingin bertemu dengan teman-temannya lagi. Maka saya titip betul melalui bantuan ini, salah satunya bisa dimanfaatkan untuk anak-anak. Sekarang beli pulsa atau paket data boleh, tapi hanya untuk daring saja (keperluan sekolah saja) jangan digunakan untuk yang lainnya," kata Zaenal.

(Bag)-o

Tatap Muka Ditunda, Sekolah Bagikan Pulsa

PURWOREJO (KR) - Rencana kegiatan belajar mengajar (KBM) tahun ajaran baru 2020/2021 dengan tatap muka kembali ditunda, menyusul belum meredanya wabah Covid-19. Termasuk masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi siswa baru, terpaksa dilakukan secara daring. "Sedianya di tahun ajaran baru ini kita akan mulai KBM dengan tatap muka, meskipun tetap mematuhi protokol covid-19, namun saat hari pertama masuk sekolah ada surat edaran (SE) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang melarang kegiatan MPLS atau masa orientasi secara langsung di sekolah," kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Purwo-

rejo Ki Gandung Ngadina SPd MPd, Selasa (28/7). Dengan adanya SE itu otomatis semua siswa belum diperbolehkan masuk sekolah, dan melakukan KBM dengan sistem daring. "Kita tidak berani melanggar aturan itu karena memang kondisi yang belum memungkinkan," kata Ki Gandung Ngadina yang juga Kepala SMK Taman Karya Madya (TKM) Teknik Taman-siswa Purworejo ini.

KBM dengan sistem daring ini lanjut Ki Gandung Ngadina, ada konsekuensi sendiri bagi sekolah. Termasuk SMK yang diampunnya. "Semua siswa kita bagikan pulsa gratis sebesar Rp 50.000/siswa," katanya seraya mengaku, untuk kelas XI dan XII sudah dibagikan sebanyak tiga ka-

li, dan untuk kelas X baru sekali. Biaya pulsa ini tambah Ki Gandung Ngadina, diambilkan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS), meskipun

jumlahnya belum mencukupi untuk kebutuhan secara keseluruhan. "Biaya ini juga kami sosialisasikan kepada para wali siswa, sehingga kekurangan

biaya untuk KBM juga dibebankan kepada wali siswa," katanya di sela-sela sosialisasi biaya berguru di SMK setempat.

(Nar)-o



KR-Gunarwan

Ki Gandung Ngadina dalam sosialisasi biaya berguru di hadapan para wali siswa.